

BAB III

EKSISTENSI MOHAMMAD NATSIR DALAM PARTAI POLITIK ISLAM MASYUMI

A. Mohammad Natsir Sebagai Anggota Masyumi

Untuk membicarakan keberadaan Natsir dalam Masyumi, tentunya penulis tidak dapat melepaskan begitu saja awal perjalanan karier Natsir untuk menuju ke jenjang keberhasilannya. Untuk itu ada baiknya diulas terlebih dahulu awal tertanamnya cita-cita Natsir untuk menuju keberhasilannya.

Sejak masa mudanya (setelah tamat dari AMS Padang) hati Natsir selalu condong terhadap agama, oleh karena itu tidak heran kalau dalam perjalanan hidupnya selalu memilih pergerakan agama. Juga tidak heran pula kalau Natsir menolak kesempatan emas untuk memperoleh bea siswa (melanjutkan kuliah ke Fakultas Hukum Jakarta dan Fakultas Ekonomi di Rotterdam) serta menolak tawaran bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda yang diperkirakan memperoleh gaji besar pada waktu itu. Semua itu beliau elakkan begitu saja, beliau justru memilih jalur pendidikan Islam¹,

¹Pendidikan Islam atau disingkat PENDIS merupakan wahana bagi perjuangan Natsir untuk membentuk kader-kader Islam.

dan penyebaran Islam yang hanya memberikan gaji pas-pasan.

Melalui persahabatannya dengan A. Hasan², Natsir melanjutkan pendidikannya terutama dalam bidang agama. Dari sini nampaknya beliau curahkan seluruh perhatiannya untuk menganalisa baik Al-Qur'an, Hadist Nabi maupun perjalanan umat Islam mulai kurun awal hingga akhir. Buah hasil dari penelitian ini yang kemudian disalurkan melalui media cetak (Panji Islam)³ cukup memberikan kesan tersendiri bagi para pembacanya. Dalam aktifitasnya, beliau lebih memilih gerakan agama yang berguna bagi bangsa dan negara. Di JIB misalnya, Natsir selalu memberikan ceramah terhadap agama dan menyimpan pemikiran-pemikiran baru kepada kalangan pemuda, sehingga di kalangan pemuda pun Natsir juga dikenal. Berkat ketulusan hati serta kecerdasan otaknya Natsir nampaknya dipercaya untuk men-

² Walaupun Natsir belajar agama tidak secara formal, karena dasar-dasarnya sudah diperoleh di sekolah Diniyah Padang, namun beliau telah belajar melalui kontak langsung dengan ulama besar A. Hassan. Berangkat dari sini bakat Natsir terarah menjadi guru dan wartawan yang mengutamakan tulisan - tulisan tentang "agama".

³ Panji Islam salah satu majalah yang bernafaskan gerakan modern dan beraliran progressif di Jawa pada saat itu. Melalui majalah ini Natsir berusaha untuk membangkitkan semangat perjuangan berdasarkan Islam, yang juga tidak kalah menariknya dengan semangat perjuangan nasional yang dibangkitkan Soekarno.

jadi pengurus besar PERSIS yang semula dipimpin oleh A. Hassan. Melalui PERSIS ini, Natsir berjuang menyebarkan "Pemikiran Modern Islam", dari perjuangan-perjuangan Natsir itu telah berhasil mempengaruhi organisasi Islam, bukan saja membangkitkan kesadaran umat Islam Indonesia terhadap agama mereka, akan tetapi juga membangkitkan perasaan nasional.⁴ Dari reputasi Natsir yang semakin menanjak itu memang tidak lain karena kemampuan Natsir yang diandalkan, oleh karenanya Natsir selalu dipercaya umat Islam (Indonesia) sebagai penyambung lidah dalam berbagai polemik antara beliau yang mewakili kelompok nasionalis Islam (melalui wadah PERSIS) dengan kelompok sekuler, (terutama Soekarno dan kawan-kawannya melalui wadah PNI). Perjuangan inilah yang kemudian menjadikan Natsir di perhitungkan sebagai salah seorang nasionalis muslim dalam skala nasional.⁵ Sebagai seorang pemuda

⁴ Alfian, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm. 70.

⁵ Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler Tentang Azas Negara R.I. 1945-1959, Pustaka, 1983, hlm.9.

yang dinamis, Natsir tidak hanya aktif dalam satu organisasi saja, namun pada waktu itu beliau masuk dalam organisasi partai PII dan beliau diangkat sebagai ketua PII cabang Bandung disamping menjadi ketua PERSIS. Kemudian dalam kancah perjuangan politik Natsir telah memilih organisasi MIAI yang kemudian dirubah Jepang menjadi partai yang tidak berpolitik, Masyumi. Dalam organisasi MIAI Natsir duduk sebagai anggota, sedangkan dalam Masyumi (buatan Jepang) Natsir terdaftar sebagai pengurus di bidang kepemudaan (karena beliau pada waktu itu tergolong sebagai angkatan muda yang revolusioner)⁶ untuk kurun waktu berikutnya, Natsir masih masuk dalam jabatan-jabatan penting.

Ketika didirikan partai politik Islam Masyumi, pada tanggal 7 November 1945, Natsir kembali dipilih menjadi anggota Pimpinan Pusat. Di dalam partai inilah kemudian Natsir berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air, perlu diketahui karena seluruh kegiatan Masyumi ditujukan terhadap perjuangan kemerdekaan. Pada kesempatan ini Natsir masuk dalam pemerintahan anggota Badan Pekerja KNIP,

⁶ Tamar Djaja, Mohammad Natsir Dalam Revolusi Indonesia, Menara Islam, Medan, tt., hlm. 8.

8

sebagai anggota beliau turut mendukung usul agar masalah agama ditinjau oleh badan tersendiri, tidak ditandatangani oleh Menteri Pendidikan.

Sebagai seorang pemuda revolusioner yang berkeinginan dalam merealisasikan dan melanjutkan cita-cita partai Masyumi, Natsir turut berkecimpung dalam pemerintahan, dengan memulai kariernya sebagai Menteri Penerangan (1946) pada masa kabinet Sjahrir I.

Dalam kiprahnya sebagai Menteri Penerangan Natsir juga berusaha menyampaikan aspirasi partainya. Ini dapat dibuktikan ketika Natsir tampil dalam sidang KNIP untuk menyuarakan kekecewaan partai Masyumi tentang perubahan sistim kabinet, dari kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Karena Masyumi berpendapat, bahwa kabinet presidensil lebih menjamin stabilitas pemerintah, sedangkan dengan adanya perubahan itu berarti melanggar Undang-Undang Dasar.⁷

Dalam kabinet berikutnya (kabinet Sjahrir II), masih diajukan partainya dalam kabinet, baru kemudian pada masa kabinet Amir Syarifuddin I dan II, Natsir tidak menjabat sebagai Menteri Penerangan karena

⁷ Lihat Deliar, Op.Cit., hlm. 154 dan juga lihat catatan kaki no.9 tentang manifest Masyumi yang berhubungan dengan pergantian Dewan Kementrian.

na ada perselisihan politik⁸ antara Masyumi dengan kabinet Amir.

Setelah kabinet Amir II bubar dan dibentuk kabinet Hatta, sebagai inti dari kabinet ini adalah Masyumi dan PNI. Kembali Natsir duduk sebagai wakil Masyumi, menjabat sebagai Menteri Penerangan sampai pada masa aksi militer Belanda ke II, tanggal 19 Desember 1948. Nampaknya seluruh kegiatan Masyumi lebih ditekankan pada perjuangan mempertahankan tanah air. Sebagai seorang anggota Masyumi yang duduk dalam pemerintahan Natsir juga turut dalam perjuangan revolusi ini. Melalui pesan-pesan Natsir yang ketika itu menjadi Menteri Penerangan, terutama untuk memberi instruksi khusus dalam mengobarkan semangat rakyat untuk menimbulkan kerusakan pada Belanda, dan upaya tersebut sedikit banyak memang berhasil menghidupkan semangat perjuangan rakyat.⁹

Selama masa revolusi itu umat Islam memang banyak memberikan sahamnya termasuk tokoh-tokoh Masyumi memperjuangkan kedaulatan R.I, terutama dalam diplo-

⁸ Masyumi meragukan i'tikad Amir yang dianggapnya kurang dapat dipercaya. Dan terbukti Amir memang pernah menyalahgunakan kekuasaan untuk kelompok sosialis atau mungkin komunis, lihat Ibid, hlm. 172.

⁹ Ibid, hlm. 186.

masi. Natsir waktu itu sebagai tokoh Masyumi juga memberikan andil yang bertindak sebagai Menteri Penerangan, atau tokoh Masyumi yang berpengaruh dalam pemerintahan dan justru pada saat itu Natsir bersama tokoh-tokoh penting ditawan oleh Belanda, ketika Yogyakarta sebagai ibu kota negara dikuasai oleh Belanda. Agar tidak terjadi kevakuman dalam pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu, tokoh Masyumi, Mr. Sjafruddin Prawira Negara (Menteri Keuangan) yang berada di Sumatra Barat membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selanjutnya akhir daripada pembebasan para pemimpin yang telah di tawan di atas, berlangsung setelah diadakan perjanjian Roem van Royen pada tanggal 4 Mei 1949. Melihat prosedur perjanjian Roem van Royen ini (terutama kebijaksanaan Roem) Natsir meletakkan jabatannya sebagai Menteri dan sebagai penasihat delegasi, karena beliau merasakan tantangan terlalu berat dan bahkan tidak sanggup untuk mempertahankan hasil perundingan Roem van Royen di hadapan partainya, Masyumi.¹⁰ Mengenai perjanjian ini juga dibahas dalam rapat Masyumi yang mencatat perdebatan sengit pihak yang pro dan kontra

¹⁰ Ibid, hlm. 193

perdebatan itu terjadi antara Natsir sebagai ketua dipihak yang kontra dan Roem sendiri memimpin yang pro. Akhir kesudahannya Masyumi memberikan persetujuan terhadap perjanjian juga.

Walaupun Natsir telah meletakkan jabatan dalam pemerintah untuk menghubungi pemimpin PDRI untuk menghubungi Republik Indonesia. Sebagai seorang tokoh Masyumi yang pantang berpangku tangan melihat situasi sekelilingnya, beliau bersedia untuk membantu menghubungi PDRI yang juga menjadi tokoh Masyumi. Bertindak sebagai ketua delegasi, Natsir berusaha mengadakan pertemuan dengan ketua PDRI itu, dalam pertemuan itu mencatat delegasi Natsir bertujuan untuk meminta persetujuan ketua PDRI bersedia kembali ke Jawa untuk menyerahkan kembali mandat kepada presiden Republik Indonesia,¹¹ Soekarno, akhirnya usaha Natsir ini berhasil. Sebagai anggota Masyumi Natsir juga dimintai bantuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah DI, walaupun Natsir sudah tidak duduk dalam

¹¹ Sebenarnya pemimpin PDRI tidak menerima prosedur persetujuan Roem Royen, akan tetapi demi menegakkan R.I dan menegakkan persatuan bangsa maka dalam perundingan tersebut ketua PDRI telah bersedia mengembalikan mandat kepada presiden Soekarno, dan keesokan harinya pada tanggal 7 Juli 1949 para pemimpin tersebut mengadakan rapat umum untuk meyakinkan kepada masyarakat akan hasil-hasil persetujuan.

pemerintahan. Sehingga Natsir berusaha untuk menghubungi Kartosuwiryo.¹²

Bersamaan dengan bulan itu, telah diadakan perundingan di negeri Belanda, Konferensi Meja Bundar, yang diketuai oleh Hatta, dari delegasi Indonesia. Dari perundingan tersebut terdengar kabar, bahwa pemerintah Belanda menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, dengan syarat penyerahan kedaulatan tanpa Irian. Mendengar ini langsung Natsir mengemukakan komentar ketidaksetujuannya. Banyak pemuka-pemuka menyatakan setuju-setuju saja, nampaknya mereka belum menyadari konsekwensinya. Hal ini dapat dilihat ketika negara berdaulat dan merdeka, banyak yang menyatakan ketidaksetujuannya dan menghendaki untuk membatalkan KMB. Semenjak kedudukan pemerintah kembali ke Yogyakarta, diadakan reshuffle (perubahan) dalam kabinet, Natsir tidak ikut di dalamnya, karena ingin memusatkan pikirannya pada Masyumi.¹³

¹² Melalui sepucuk surat, Natsir menghubungi Kartosuwiryo pada tanggal 5 Agustus 1949. Berusaha meredakan ketegangan dan mencegah timbulnya NII yang diproklamlirkan Kartosuwiryo. Akan tetapi sangat disesalkan Kartosuwiryo masih bersikeras pada prinsipnya dengan tidak dapat mencanuk kembali proklamasi NII.

¹³ Tamar Djaja, Op.Cit., hlm. 12.

Saat-saat inilah masa berakhirnya Natsir sebagai anggota Masyumi dan untuk selanjutnya Natsir diangkat menjadi ketua Dewan Pimpinan Partai untuk menentukan haluan politik partai.

B. Aktifitas Mohammad Natsir dalam Masyumi ✓

Tentunya dengan melihat peran Natsir yang amat penting dalam pemerintahan, sering dipercaya pemerintah dalam menangani persoalan negara diatas, dan kemampuannya yang dapat diandalkan. Secara tidak langsung, yang menyebabkan terpilihnya beliau menjadi ketua Masyumi. Disamping Natsir sudah mempunyai pengaruh yang besar dalam Masyumi. Ini tidak berarti mengesampingkan tokoh-tokoh yang lebih tua dalam Masyumi. Walaupun pengaruh Natsir masalah revolusi ini tidaklah berarti mengesampingkan tokoh-tokoh yang lebih tua karena ini memang tidak dibenarkan oleh tradisi, bahkan dikecam dalam partai Masyumi pada waktu itu.¹⁴ Sebagai jalan tengah dari persoalan itu para anggota Masyumi lebih cenderung untuk mempersatukan kelompok tua dan muda,¹⁵ dengan mengambil Soe-

¹⁴ Deliar, Op.Cit., hlm. 60

¹⁵ Lihat susunan Pimpinan Pusat Masyumi 1949, yang mencantumkan Natsir sebagai ketua Masyumi, sedangkan Soekiman menjabat sebagai presidennya.

kiman sebagai ketua presidium bagian eksekutif. Setelah Natsir sudah tidak menjabat lagi dalam pemerintahan dan ingin memusatkan perhatiannya dalam partai Masyumi, beban dan tanggung jawab partai dilettakkan padanya, beliau diangkat menjadi ketua Dewan Pimpinan partai dalam sebuah kongres di Yogyakarta. Natsir pada waktu itu diserahi tugas memindahkan DPP Masyumi dari Yogyakarta ke Jakarta, beliau bekerja keras untuk menyelesaikan susunan daftar pimpinan Masyumi 1949.

Setelah adanya pemindahan kantor pusat Masyumi dari Yogyakarta ke Jakarta, para pemimpin Masyumi bermaksud kurang mencampuri urusan politik yang dihadapi pemerintah, seakan masalah ini dapat diselesaikan pemerintah saja. Masyumi tidak bermaksud merebut kedudukan-kedudukan dalam pemerintahan. Oleh karena sebelumnya dalam sebuah kongres Masyumi di Yogyakarta pada bulan Desember 1949 memutuskan bahwa ketua umum pimpinan partai tidak dibenarkan menjadi menteri. Lebih dari itu Masyumi lebih berminat untuk membina organisasinya. Padaakhir 1949, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1949, Pimpinan Masyumi mengeluarkan instruksi ke segenap cabangnya di seluruh Indonesia agar aktif dalam lembaga perwakilan dae -

rah.¹⁶

Harapan para pemimpin Masyumi untuk tidak mencampuri persoalan dalam pemerintahan tidak dapat diteruskan, karena pada masa permulaan RIS ini banyak persoalan yang mesti dihadapi partai. Banyak kalangan yang ingin membubarkan RIS dan persoalan ini tidak dapat semata-mata diserahkan kepada pemerintah. Beruntung juga masyarakat, karena pada saat genting ini Natsir sebagai ketua Masyumi segera menyelamatkan negara melalui mosi integralnya yang dapat mengamankan negara yang dalam keadaan kacau. Maka berkat jasa-jasanya itu, sejak tanggal 17 Agustus 1950 resmilah negara Indonesia menjadi negara kesatuan, dan Natsir semakin memperoleh pengaruh dalam pemerintah, maka berkat jasa-jasanya itu akhirnya presiden mempercayakan kepada Natsir sebagai pembentuk kabinet.

Natsir bersedia menjadi Perdana Menteri atas kesepakatan yang diputuskan kongres oleh Dewan Partai di Bogor tanggal 3-6 Juni 1950, yang dihadiri oleh wakil-wakil daerah. Keputusan ini berarti mengubah keputusan kongres sebelumnya (Desember 1949) yang melarang ketua umum partai menjadi menteri, yang ber-

¹⁶ Deliar, Op.Cit, hlm. 200-201.

87

arti berlaku juga bagi Natsir. Agaknya perubahan keputusan ini, lebih didasarkan bahwa Masyumi merasa ikut terpanggil untuk memikul tanggung jawab dalam pemerintahan, oleh karenanya dalam kongres di Bogor menetapkan bahwa bila diperlukan, kita akan mengambil kepemimpinan pemerintahan di tangan kita. Dan ini juga berlaku untuk ketua umum partai dan kalau perlu bisa menjadi menteri. Keputusan lainnya, juga disebutkan bahwa partai menghendaki agar kursi-kursi Perdana Menteri, dalam negeri, pertahanan dipegang oleh Masyumi. Agar keputusan ini tidak terlalu dilanggar, konferensi juga memutuskan Natsir nonaktif sebagai ketua umum partai. Sedangkan Yusuf Wibisono menjadi pejabat ketua.¹⁷

Sejak awal pembentukan kabinet Natsir sudah mengalami kesulitan terutama dalam berhadapan dengan PNI. Sebagai pembentuk kabinet, Natsir yang bertindak atas nama Masyumi tentunya lebih berhak dan merasa berkewajiban untuk mendudukkan partai Masyumi dalam posisi yang penting, bersamaan dengan itu PNI juga menuntut hal yang sama. Mengingat tuntutan PNI atas kursi dalam negeri sangat menentukan sekali da-

¹⁷ Ibid, hlm. 205

lam pengangkatan gubernur, residen dan Bupati juga kursi Menteri Pendidikan sangat menentukan terhadap penentuan corak pendidikan di sekolah-sekolah,¹⁸ maka sebagai jalan terbaik Natsir memberikan kebijaksanaan politik (tentunya dengan melalui terlebih dahulu melalui pertimbangan/persetujuan presiden) membentuk kabinet tanpa PNI.

Usaha Natsir dalam pembentukan kabinet ini bukan berarti tidak mendapat kecaman dalam kalangan Masyumi sendiri. Kecaman itu datang dari Soekiman, terhadap kabinet Natsir terutama terhadap kebijaksanaan kabinet dengan meninggalkan PNI, dikatakannya tindakan Natsir sangat berani dalam meninggalkan PNI kabinet Natsir dikecam sebagai zaken kabinet, yang tidak terdiri dari wakil-wakil partai seperti yang diperintahkan presiden dan sesuai dengan keinginan rakyat. Soekiman menyesalkan, tidak dipertahankannya sifatkoalisi dalam kabinet. Dari beberapa kecaman

¹⁸ Kebijaksanaan untuk tidak melepaskan Menteri Pendidikan agaknya lebih di dorong oleh pertimbangan bahwa kementrian ini merupakan lahan perjuangan umat Islam dan pembangunan rakyat Indonesia. Sebaliknya, sikap PNI lebih mempertahankan Menteri Pendidikan karena merasa takut akan pengaruh Islam atas sistim pendidikan di sekolah-sekolah negeri.

Soekiman ini agaknya perlu juga dilihat bahwa dengan terpilihnya orang-orang tidak berpartai dalam kabinat Natsir, namun terdiri dari kalangan orang-orang yang berkemampuan dan disegani, merupakan keperluan yang lebih sesuai bagi negara saat itu.¹⁹ Soekiman yang pada saat itu menjadi ketua fraksi Masyumi dalam parlemen akhirnya menerima program pemerintah itu, karena memang melihat keadaan negara pada saat itu. Semenjak Natsir menjadi Perdana Menteri kebijaksanaan politiknya dalam kabinet banyak memberi keuntungan kepada Masyumi, terutama dengan berlakunya PP 39. tahun 1950.²⁰ Karena di dalamnya memuat pera-

²⁰Yang paling menguntungkan Masyumi dari implikasi PP no.39 1950 terutama pasal 4 yang berisi tentang:

1. Badan-badan perwakilan kabupaten, kota besar, dan kota kecil serta daerah yang setingkat dibentuk oleh suatu badan yang anggotanya ditunjuk oleh partai politik, serikat buruh, organisasi tani, organisasi pemuda, organisasi wanita dan organisasi sosial yang didirikan pada tiap kecamatan dari kabupaten atau daerah-daerah yang setingkat dengan kecamatan di kota besar dan kota kecil.

2. Organisasi-organisasi tersebut di atas harus mempunyai pengurus pusat, mempunyai cabang sekurang-kurangnya tiga kabupaten dalam satu propinsi dan bahwa ia sudah terbentuk di kecamatan 30 Juni 1950. Undang-undang tersebut memang strategis sekali bagi Masyumi, karena Masyumi sejak semula sudah mempunyai organisasi-organisasi seperti itu. Inilah sebagai suatu yang dapat dilihat kebijaksanaannya Natsir terhadap Masyumi. Dan sebenarnya pihak oposisi sendiri tidak merelakan hal ini. Tentang UU pasal 4 di atas lihat, Deliar Noer, Op.Cit, hlm. 210 dalam catatan kaki no. 24.

¹⁹Deliar Noer, Op.Cit, hlm. 210.

turan yang cocok sekali diterapkan dalam sistim keanggotaan Masyumi yang banyak mempunyai massa terdiri dari keanggotaan langsung dan tidak langsung, serta badan khusus. Sebenarnya PP No. 39 tahun 1950 ini merupakan produk dari kabinet sebelumnya (kabinet Hakim), sedangkan kabinet Natsir kemudian mempunyai suatu tanggung jawab untuk meneruskan kebijaksanaan kabinet sebelumnya.

Kebijaksanaan politik kabinet Natsir yang juga ditetapkan dalam salah satu program perjuangan Masyumi, adalah menetapkan Irian Barat, tetap menjadi tuntutan nasional selama belum masuk wilayah Indonesia. Dalam hal ini Natsir mengimplikasikan perjuangan dengan cara diplomasi dan cara damai. Nampaknya, model penyelesaian ini sangat membutuhkan waktu agak panjang. Bagi sebagian partai yang radikal revolusioner sering menyatakan ketidaksetujuannya.

Demikian pula halnya dengan presiden yang telah menyatakan ketidaksetujuannya, mendesak untuk segera mengambil sikap terhadap Belanda dan presiden sendiri telah melaksanakan atau telah memulai tindakan itu melalui pidatonya. Presiden menuntut kembal-

nya Irian Barat.²¹ Dengan adanya campur tangan presiden ini sudah sewajarnya Natsir sebagai Perdana Menteri berhak mengingatkan, secara jujur beliau mengatakan kepada presiden, bahwa "Kabinetlah yang berwenang merancang dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan". Karena dengan peringatan Natsir ini presiden masih bersikeras untuk memaksakan idenya maka Natsir memberi komentar secara terbuka, bahwa : "Dalam suatu kabinet parlementer, mengenal soal - soal politik, hak pengambilan keputusan terletak pada kabinet dengan persetujuan parlemen." Pernyataan Natsir secara terbuka ini kemudian ditanggapi dengan perasaan tersinggung presiden yang kemudian dihubungkan dengan persoalan-persoalan pribadi presiden

²¹ Pada prinsipnya Bung Karno menghendaki penyerahan Irian Barat dengan segera dan jika tidak pemerintah Indonesia akan keluar dari UNI. Oleh karena dari berbagai perundingan yang dihasilkan belum memegang prinsip untuk terus memperjuangkan Irian (yang menjadi klaim nasional) dengan cara yang patut. Sepertinya melalui perundingan maka dilakukan atas dasar penyerahan kedaulatan, atas Irian Barat kepada Indonesia. Dengan demikian berarti persoalan itu membutuhkan waktu yang lama, dan berarti tidak sesuai dengan yang dikehendaki presiden. Presiden malah bersikeras agar secepatnya penyerahan kedaulatan Irian Barat dilakukan secepatnya, walaupun tanpa dengan persetujuan dengan Belanda dan jika tidak, akan keluar dari UNI Indonesia-Belanda. Sedangkan yang menjadi masalah Natsir, mengenai UNI ini, adalah sudah menjadi persoalan internasional, dan persoalan ini, harus melalui perundingan terlebih dahulu.

92

merasa wibawanya menurun. Masalah ini kemudian menjadikan putusnya hubungan antara Natsir dengan presiden yang kemudian menjalar dalam perkembangan politik selanjutnya.²² Tidak hanya sekedar ini, lebih bijaksana, Natsir membawa persoalan ini dalam sidang yang dihadiri para anggota kabinet dan presiden sendiri. Dari hasil musyawarah tersebut diketahui, setelah diadakan pungutan suara, memperlihatkan lebih banyak persetujuan bagi pendapat Natsir ketimbang presiden. Ternyata hasil sidang ini dirasakan presiden sebagai pukulan terhadap kewibawaannya yang kemudian tidak bisa beliau maafkan.²³ Beranjak dari sini kemudian berakibat dalam mempercepat umur kabinet Natsir. Yang terjadi kemudian justru presiden secara tidak langsung menyokong parlemen²⁴ untuk memperpendek umur kabinet Natsir, yang banyak memberlakukan, berbagai kebijaksanaan Masyumi ini. Untuk selanjut -

²²Yusuf Abdullah Puar, Op.Cit, hlm. 118-120.

²³Ibid, hlm. 119

²⁴Dalam pidato peringatan Mohammad Natsir 70 tahun, Hatta memberikan ulasan, bahwa setelah timbul ketegangan antara presiden Soekarno dan Perdana Menteri Natsir, presiden Soekarno akhirnya malah merencanakan untuk menjatuhkan kabinet Natsir melalui anggota DPR dari PNI. Diantaranya Manai Sofyan untuk merencanakan menjatuhkan kabinet Natsir. Lihat Yusuf Abdullah Puar, Op.Cit, hlm. 321.

9-
penulis uraikan langkah cepat menuju pembubaran kabinet Masyumi ini, bermula dari usaha-usaha pihak oposisi, PNI untuk menjatuhkan kabinet Natsir, dengan mempersoalkan PP No. 39 tahun 1950, yang sebenarnya, produk kabinet sebelumnya. Mereka menghendaki pencabutan tentang pemilihan dari anggota-anggota lembaga perwakilan daerah. Melalui Mosi Hadikusuma mereka lalu menghendaki suatu UU baru, yang dikatakan lebih demokratis.

Dalam keterangannya Perdana Menteri M. Mohammad Natsir yang disampaikan dalam keputusan kabinet, menyetujui pembubaran (usul) diatas, dengan catatan hendaknya terlebih dahulu dibuat Undang-Undang baru sebagai penggantinya, agar tidak terjadi kekosongan. Ternyata pihak oposisi malah menunjukkan ketidaksa-
barannya, mereka menghendaki agar waktu itu juga diadakan pembubaran, mereka mengadakan pemboikotan pada sidang DPR yang sedang membicarakan persoalan mereka. Mereka sengaja datang dalam sidang DPR, namun mereka tidak lagi menduduki kursi yang tersedia untuk para anggota, sehingga kuorum tidak tercapai, hal ini mereka lakukan berulang-ulang. Sebagai akibat dari sabotase (baik PNI atau PKI) di atas serta sikap presiden yang konfrontatif terhadap kabinet Nat-

9

sir, akhirnya Natsir meletakkan mandatnya sebagai Perdana Menteri tanggal 21 Maret 1951.

Sebagai Perdana Menteri langkah-langkah Natsir sebenarnya tidak terlalu jauh dari kebijaksanaan Masyumi, bahkan sebaliknya banyak memberikan keuntungan terhadap Masyumi, ini dapat dilihat dari kongres Masyumi di Jakarta tanggal 27-30 Januari 1951 yang mendukung sepenuhnya kebijaksanaan Natsir sebagai ketua umum partai serta langkah-langkahnya sebagai Perdana Menteri.²⁵ Yang demikian itu terjadi karena sejarah kabinet Natsir dari awal terbentuknya sampai pada Mukhtamar Masyumi ke V, kabinet Natsir dari awal telah membawa hasil yang menguntungkan partai (Masyumi) dan partai.²⁶

Sejak Natsir meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri, beliau lebih banyak mengaktifkan diri dalam partai. Sebagai pemimpin partai Natsir melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengunjungi daerah-daerah. Beliau yang pada waktu itu menjadi ketua partai, tentunya aktif juga ke Kantor Masyumi, malah di ceritakannya bahwa Natsir berangkat dengan naik se-

²⁵ Lihat Deliar Noer, Op.Cit, Dalam catatan kaki no. 39 hlm. 214.

²⁶ Amanat, Sambutan Pernyataan dan Pidato Mohammad Natsir, Ketua Umum DPP Masyumi, Dalam berita dan suara Masyumi (1950-1959), LIPPM, hlm. 18.

peda. Dalam rangka kunjungannya ke daerah bersama - sama dengan pemimpin partai Masyumi, Mr. Roem, Mr. Sjarifuddin. Kunjungan itu dilakukan terutama seluruh daerah yang termasuk keluarga Masyumi di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membantu daerah memperkenalkan dalam konferensi daerah-daerah dan untuk melihat persoalan nasional serta memperkenalkan bagaimana Masyumi melihat persoalan-persoalan itu.²⁷ Sebagai seorang pemimpin Masyumi beliau juga menekankan terhadap pembinaan kader-kader yang menurutnya akan disertai tugas memimpin di masa mendatang. Dikatakan-nya pula, menjadi tugas pemimpin tua untuk memberi kesempatan kepada mereka agar pada suatu saat dapat mengemudikan kendali perjuangan partai. Terhadap pihak pemuda angkatan baru itupun Natsir menganjurkan hendaknya mereka menyediakan diri untuk menjadi kader partai.²⁸

Sepeninggal kabinet Natsir jatuh, Natsir sebagai ketua umum partai Masyumi sengaja tidak duduk dalam pemerintahan, tugas itu cukup diserahkan kepada kawan-kawannya. Ini tidak berarti Natsir hanya diam

²⁷Yusuf Abdullah Puar, Op.Cit, hlm. 386.

²⁸Komentar Partai Masyumi di atas dimuat dalam Suara Partai Masyumi Tahun 6, No. 6, Januari 1951, dalam Amanat, II, Op.Cit, hlm. 50

menyaksikan kekeliruan-kekeliruan dan kesulitan yang ada dalam pemerintahan. Lebih dari itu, sebagai seorang yang kritis terhadap situasi yang ada dan sebagai konsekwensi dari ucapannya, Natsir tidak segan-segan mengingatkan kebathilan yang ada dalam pemerintahan dan ikut merasakan atau memikul tanggung jawab yang ada, oleh karenanya pada pembentukan kabinet Soekiman (1951-1952) melihat perjuangan politik Natsir terhadap partainya serta kebijaksanaan politik Natsir terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan partai Masyumi, yang tentunya mendapat dukungan dari Masyumi, maka pantaslah pada tahun 1952, Natsir dipercaya kembali menjadi ketua Masyumi, yang diumumkan pada Mukhtamar Masyumi ke VI .

Pada kesempatan itu berhasil pula, menurut pengakuan Natsir, dirumuskan cita-cita partai yang telah diubah perjuangan politiknya dengan mempertegas: "Melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan orang-orang, masyarakat dengan negara."²⁹ Menjadi tugas serta kewajiban Masyumi menurut Natsir, memperjuangkan cita-cita di atas dengan melalui jalan yang sah, sebagaimana yang terbuka jalannya dalam negara R.I ,

²⁹ Perjuangan Masyumi, Op.Cit, hlm. 39.

yang mendasarkan kedaulatan rakyat ,melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara negara demokrasi. Pada saat itu Natsir sebagai ketua Masyumi telah berhasil juga menyelesaikan tugasnya.³⁰

Lebih lanjut dapat dilihat perjuangan politik Natsir dalam mengemban perjuangan politik partai Masyumi, yang diimplikasikan dalam keikutsertaan Masyumi dalam pemerintahan, pada kabinet s selanjutnya (Soekiman). Untuk hal ini Natsir menyelenggarakan Rapat Pimpinan Partai.³¹

Dalam kesempatan kabinet Soekiman ini Natsir , memberikan kebijaksanaan (yang sudah ditentukan dalam keputusan rapat Dewan Partai Masyumi) dengan memberikan kesempatan kepada kabinet, dengan tidak mengikat kabinet Soekiman dalam mengambil langkah-langkah

³⁰ Lihat Anggaran Dasar Masyumi 1952 pasal VII ayat 1, Tentang Tugas Pimpinan Partai Dalam Perjuangan Masyumi, lihat Ibid.

³¹ Dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 1951, terjadi perdebatan seru. Pertentangan pendapat ini lebih dilihat oleh Roem sebagai antagonisme.

Dalam suatu bantahannya Natsir menganggap pertentangan pendapat ini sebagai suatu hal yang wajar dalam partai dan tidak dapat dilihat sebagai hal yang sebaliknya, karena diantara perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan dalam suatu konferensi dengan keputusan akhir yang harus dijalankan.

kahnya (kebijaksanaannya).³²

Oleh karenanya Natsir menegaskan dalam pidato Ketua Fraksi Masyumi dalam Parlemen bahwa: "Bertindak atas nama partai akan memberi kesempatan kepada kabinet Soekiman-Suwirjo melakukan tugas dan memberi bantuan dengan berpedoman kepada kepentingan negara dan cita-cita umat yang terwakili dalam partai Masyumi. Ternyata memang kabinet Soekiman ini telah mengambil oper program kabinet Natsir yang sebelumnya banyak dikecam oleh pihak oposisi PNI yang telah menduduki kabinet Soekiman ini. Natsir sebagai ketua Masyumi memang telah memberikan kesempatan terhadap kabinet Soekiman untuk melaksanakan programnya, walaupun tidak setuju terhadap cara kabinet Soekiman, tindakan ini dimaksudkan atau Natsir tidak ingin mengadakan perpecahan."³³

Dari sisi lain pengambilan oper program di atas mencerminkan sikap oposisi (PNI) yang dilakukan,

³² Kebijakan itu telah disepakati dalam keputusan rapat Dewan Partai Masyumi ke I tanggal 22 - 23 Mei 1951, di Jakarta, yang berisi antara lain :

1. Tidak mempersoalkan kualifikasi dari kabinet Soekiman.

2. Memberikan kesempatan dan bantuan kepada kabinet untuk menunaikan tugasnya.

3. Mengadakan segala usaha agar supaya pimpinan dan tanggung jawab dari pimpinan partai terhadap negara tetap terpelihara. (lihat Amanat, II, Op.Cit, hlm 22)

³³ Deliar Noer, Op.Cit, hlm. 217.

terhadap kabinet yang dipimpin oleh Natsir, tidak obyektif sama sekali, maka sewajarnya kalau pihak Natsir tidak dapat menahan perasaan getirnya terhadap oposisi.³⁴

Dalam kebijaksanaannya kemudian (menginjak kejatuhan kabinet) telah menginjak keluar dari politik luar negeri bebas dan aktif, yakni tentang persetujuan bantuan Amerika Serikat melalui MSA (Mutual Scurity Act, Undang-Undang keamanan bersama dari AS) untuk hal yang satu ini kelompok Natsir memberikan reaksi keras, karena dengan kebijaksanaan itu, berarti keluar dari politik bebas dan aktif. Sebenarnya partai-partai lain juga membenarkan reaksi kelompok Natsir ini. Karena masalah ini dianggap masalah yang serius, menurut Natsir. Maka perlu diadakan rapat yang dihadiri oleh Soekiman, Yusuf Wibisono (pembela perjanjian) dan Soebarjo (penandatanganan perjanjian itu) tapi Soebarjo tidak hadir. Pada keputusan rapat pimpinan pusat Masyumi memberikan keputusan untuk menolak kebijaksanaan luar negeri Soebarjo tentang perjanjian bantuan MSA, namun tidak berarti partai Masyumi menarik menteri-menterinya dalam kabinet. Persoalan ini kemudian tidak mendapat penyelesaian ,

³⁴ Ibid.

dan membawa pada kejatuhan kabinet 23 Februari 1952, dan kemudian diganti dengan kabinet Wilopo 13 April 1952.

Untuk mencegah terjadinya pertentangan yang lebih tajam tentang bentuk kabinet (Koalisi atau Zaken kabinet), Natsir sebagai pemimpin Masyumi menyumbangkan pendapatnya, bahwa: "Dalam pembentukan kabinet ini tidak perlu mempermasalahkan istilah (Koalisi atau Zaken kabinet), karena ini hanya menyangkut, perbedaan interpretasi dan bukan berhubungan dengan sikap kabinet. Yang paling penting menurut Natsir, adalah membentuk pemerintahan yang memperoleh cukup kesempatan dan memenuhi syarat yang diperlukan guna melaksanakan pemerintahan sampai Pemilihan Umum diselenggarakan.³⁵ Pada kesempatan ini pimpinan Masyumi, Natsir memberikan kepercayaan-kepercayaan kepada Prawoto bahkan juga memberikan program,³⁶ untuk mempermudah tugas kabinet. Yang sangat dalam pembentukan kabinet ini adalah perselisihan masalah kursi

³⁵ Ibid, hlm. 220.

³⁶ Diantara program yang disumbangkan Masyumi, adalah: agar PEMILU diadakan dalam setahun, keamanan dan ketertiban dapat pulih segera, agar penyediaan pangan diusahakan segera sebagai dasar terpenting bagi tegaknya stabilitas ekonomi negara, lihat Ibid.

101

agama. Persoalan kabinet ini merupakan persoalan be-
besar yang dihadapi Masyumi, terutama adanya tuntu-
tan dari NU untuk mengang kursi agama. Sebagaimana
yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya, akibat
dari keinginan NU yang tidak dapat dicegah itu, NU
menjadikan dirinya sebagai partai politik tersendiri.

Menengok perpecahan dalam tubuh Masyumi atas
keluarnya NU dari Masyumi ini tentunya penulis juga
harus menulis andil presiden pada saat itu yang meng-
adakan pertemuan (berunding) dengan K.H. Abdul Wahab
pemimpin NU tentang masalah kabinet. Padahal cara ini
tidak lazim dilakukan presiden, yang mestinya memba-
tasi pertemuan dengan partai-partai saja. Walaupun ,
dalam pertemuannya dengan presiden, K.H. Abdul Wahab
mengatakan, ia tidak membicarakan masalah politik de-
ngan presiden, tentunya pembicaraan antara keduanya
tidak dapat diartikan hanya sekedar basa-basi saja.³⁷

Sebenarnya tidak kurang usaha Natsir sebagai
pimpinan partai dalam rangka menghadapi sikap NU ini,
karena pada dasarnya sejak semula Natsir selalu akan
menekankan persatuan umat dalam merealisasikan cita-
cita partai.³⁸

³⁷ Ibid, hlm. 221.

³⁸ Amanat, II, Op.Cit, hlm. 43.

Sebagai salah satu usaha tersebut, Natsir mengadakan pertemuan antara pemimpin Masyumi untuk memusyawarakkan calon Mentri Agama yang bakal duduk dalam kabinet. Hasil pertemuan itu mencatat, setelah diadakan pungutan suara lebih banyak. Berarti hasil musyawarah itu tidak memenuhi tuntutan maupun harapan NU, dan NU kemudian betul-betul melaksanakan niatnya untuk keluar dari Masyumi. Tentunya "Perpecahan" dalam tubuh Masyumi ini, merupakan persoalan di luar kemampuan Natsir untuk dapat berbuat lebih banyak. Bagi Natsir hasil pungutan suara dalam rapat adalah hasil final yang tidak dapat diganggu gugat, sedangkan NU walau bagaimanapun tidak menerima keputusan itu, dalam posisinya sulit itu Natsir terpaksa merelakan keluarnya NU dari Masyumi. Apalagi kabinet Wilopo sendiri menyetujui kebijaksanaan Natsir sebagai ketua Masyumi, atau dengan kata lain kabinet Wilopo menyetujui keputusan Masyumi ini. Perlu juga diketahui perjalanan kabinet Wilopo (PNI), Yusuf Wibisono (Masyumi) ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan (dalam menangani peristiwa Tanjung Marowa, nasionalisasi tambang minyak di Sumatra dan kebijaksanaan luar negeri, terutama penempatan kedutaan besar di Moskow) negara, terutama Wilopo lebih sejalan dengan kelompok Natsir ketimbang partainya PNI³⁹.

³⁹ Deliar Noer, Op.Cit, hlm. 226.

10

Dengan tidak melalaikan persahabatan dengan negara-negara Islam pada bulan April 1952, Natsir melakukan perjalanan ke luar negeri.⁴⁰ Dari perjalanan ini Natsir merasakan akan terjalinnya hubungan persahabatan akrab dengan para pejabat-pejabat serta pemimpin-pemimpin muda luar negeri hubungan ini nantinya akan berlanjut dengan partisipasi beliau ke arah penyelesaian persoalan umat Islam (internasional) yang amat serius.

Suatu kabar baik yang disampaikan Natsir pada Kongres Masyumi yang diselenggarakan selama 7 hari ini, telah berhasil merampungkan persoalan besar terutama mengenai hal: rumah tangga partai, perlengkapan rencana-rencana partai, program perjuangan, keterangan azas dan penyempurnaan rangka-rangka dan alat organisasi. Dan yang terakhir tentang garis politik baik dalam maupun luar negeri yang akan ditempuh oleh umat Islam Indonesia, telah diper⁴¹ -

⁴⁰ Natsir berkunjung ke luar negeri atas undangan Pakistan untuk menghadiri rapat lembaga Institute for International Affairs juga atas undangan dari Birma dan India. Selain itu Natsir juga berkunjung ke negara Timur Tengah, Saudi Arabia, Irak, Iran, Siria, Lebanon, Turki, Mesir. Dalam kunjungan ke luar negeri ini berlangsung selama 2 bulan dan kembali ke tanah air tanggal 5 Mei 1952. Lihat Ibid, II, hlm. 39-42 juga Yusuf, Op.Cit, hlm. 133-138.

10
tegas.⁴¹

Ketika kabinet Wilopo (PNI), Yusuf Wibisono (Masyumi) mengalami kejatuhannya. Sebenarnya ada usaha dari Masyumi untuk mempertahankan kabinet,⁴² namun usaha dari Masyumi tidak mendapat sokongan dari partai lain malah dari partai PNI sendiri telah menyampaikan kecamannya terhadap kabinet dan menghen - daki bubarnya kabinet. Reaksi keras ini datang dari Sidik Djojokusarto (PNI). Akhirnya sampai pada kejatuhan kabinet ini Natsir memberikan analisa bahwa "Tidak mungkin mengadakan satu pemerintahan yang stabil selama partai pemerintah dalam parlemen mengadakan koalisi dengan oposisi."⁴³ Pada pertengahan tahun 1953 telah terbentuk kabinet Ali Sastro Ami

⁴¹ Pidato selengkapnya lihat Suara Masyumi tahun 7 No.9/10 September-Oktober 1952 yang dibendel, dalam Amanat, II, Op.Cit, hlm. 43.

⁴² Pada tanggal 26 Mei 1953 Masyumi mengadakan rapat dengan PNI untuk membicarakan sikap PNI terhadap Mosi Kertepati yang didukung anggota parlemen PNI. Dalam rapat itu memberikan jawaban bahwa PNI masih bekerjasama dengan Masyumi untuk memelihara kelangsungan kabinet dan mengatasi soal-soal parlemen. Untuk rapat yang ke 2 tanggal 31 Mei 1953 ditunda tanggal 1 Juni karena Sidik Djojokusarto tidak hadir. Dari sini berakhir dengan jatuhnya kabinet.

⁴³ Mohammad Natsir, Capita Selecta, II, Pustaka Pendis, Jakarta, tt, hlm. 33.

10
djojo,⁴⁴ sengaja partai Masyumi tidak diikutsertakan di dalamnya, yang berarti Masyumi duduk sebagai partai oposisi. Dengan demikian berhasillah langkah - langkah kelompok tertentu untuk menyingkirkan Masyumi dari arena percaturan politik dalam pemerintahan. Akan tetapi usaha-usaha kelompok itu tidak menjadi - kan langkah mundur bagi M. Natsir sebagai ketua partai Masyumi, untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan, M. Natsir malah mengatakan bahwa "walaupun partai Masyumi tidak duduk dalam pemerintahan, partai Masyumi tetap ikut memikul tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan negara" dan oposisi yang dilakukan partai Masyumi adalah melalui prosedur, cara-cara tata tertib demokrasi,⁴⁵ bahkan berpedoman atas landasan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan keselamatan bangsa dan negara.⁴⁶

⁴⁴ Sengaja kabinet ini didukung oleh PKI, dan M. Natsir sudah merasakan hal ini. Kenyataan ini terlihat pada pembentukan kabinet bahwa orang-orang PKI berusaha mendepak partai Masyumi keluar dari kabinet, pernyataan PKI untuk mengemban kabinet kepada pemerintahan yang formal bersatu tetapi dengan mengesampingkan partai Masyumi. Deliar Noer. Op Cit. hlm. 229 dan 238.

⁴⁵ Amanat, II, Op Cit. hlm. 47

⁴⁶ Menurut M. Natsir, dalam negara demokrasi berarti harus melakukan tugas oposisi, pengawas, pengancam dan penegur jalannya pemerintahan untuk keselamatan umat dan negara berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar.

10

Kembali kita ikuti kebijaksanaan politik M. Natsir dalam membawa partai Masyumi dalam percaturan politik nasional. Semenjak masa Kabinet Ali Sastro Amidjojo partai Masyumi yang pada saat itu masih diketahui M. Natsir mengalami nasib kurang menguntungkan, tampil sebagai partai oposisi dalam pemerintahan. Sebagai partai politik yang tidak duduk dalam pemerintahan,⁴⁷ tentunya M. Natsir mengambil kebijaksanaan politik, untuk tidak begitu saja melepaskan tanggung jawabnya terhadap umat Islam dalam negara. Walaupun partai Masyumi sengaja diketepikan oleh kelompok tertentu yang melihat Masyumi sebagai penghalang nasional. Kabinet Ali yang kemudian diketahui banyak pihak lebih tidak menguntungkan kepentingan negara, bahkan hanya mementingkan partai-partai yang duduk dalam kabinet. Maka terhadap kabinet yang semakin lama dapat bertahan hanya dengan dukungan komunis (PKI) yang dengan sengaja mendesak Masyumi dalam gelanggang politik nasional ini. M. Natsir dengan nada diplomatik menyatakan "Walaupun Masyumi tidak duduk dalam pemerintahan namun Masyumi tidak dapat dikesampingkan begitu

⁴⁷ Tidak ikut sertanya Masyumi dikatakan sebagai permainan politik Ali Santro Amidjojo I yang tidak pernah diduga sejak semula. Permainan politik ini disebut Deliar, lebih banyak didorong pada kepentingan diri, pembagian kursi atau dagang sapi menjadi ciri kabinet ini.

107

saja". Bagi seorang pemimpin yang merasa bertanggung-jawab atas keselamatan umat seperti M. Natsir ini, duduk atau tidak duduknya Masyumi dalam kabinet ' tidak menghalangi bagi Masyumi untuk tidak memikul tanggung jawab⁴⁸ terhadap keselamatan negara. Atas rasa tanggung jawabnya terhadap partai sehubungan dengan masalah tersebut M. Natsir menyatakan:

"Tanggung jawab kaum muslimin Indonesia yang berdiri di belakang Masyumi tidak dimulai jika Masyumi duduk dalam pemerintahan. Di dalam atau di luar kita tetap akan menjaga kesejahteraan negara kita".⁴⁹

Sehubungan dengan partai Masyumi menjadi partai oposisi, sebagai pimpinan Masyumi M. Natsir tidak menginginkan partai yang dipimpinnya menjadi partai pinggiran yang hanya sanggup menonton panggung sandiware politik pemerintah dan kemudian menggerutu, bagi M. Natsir perbaikan rakyat dan kesejahteraan rakyat tetap akan dirasakan sebagai tanggung jawab partai Masyumi sebagai oposisi. Oposisi yang diinginkan M. Natsir atas partai yang dipimpinnya adalah oposisi yang diijinkan oleh demokrasi dan jika dianggap perlu oleh

⁴⁸Tentang tanggung jawab Masyumi, jauh sebelumnya sudah disebutkan M. Natsir dalam keterangan Azas Masyumi, lihat perjuangan Masyumi, Op Cit, hlm. 50.

⁴⁹Amanat II, Op Cit, hlm. 47. Yang diambil dari Suara Partai Masyumi Agustus 1953.

keadaan atas dasar rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Kaitannya dengan partai Masyumi yang menjadikan Islam sebagai dasarnya Natsir menerangkan kedudukan oposisi mempunyai tugas dan fungsi yang sudah ada dasarnya dalam ajaran-ajaran Islam yang berpokok pada amar ma'ruf nahi munkar, satu perintah Ilahi yang tidak mengenal ruang dan waktu.⁵⁰

Pendapat M. Natsir di atas bukannya tidak membawa manfaat, lebih dari itu konsekuensi dari putusan M. Natsir di atas menjadikan manuver untuk mencounter terhadap kesalahan kabinet Ali I. Sebagai yang telah diduga sebelumnya dengan tidak ikut sertanya Masyumi dalam kabinet banyak terjadi ketimpangan dalam negara, akibat dari pada ekonomi politik kabinet Ali I, korupsi merajalela di mana-mana dan membawa dampak terhadap jurang inflasi yang amat dalam di Indonesia, politik keamanan kabinet ini justru tidak meredakan kekacauan yang ada tetapi justru sebaliknya, politik luar negeri kabinet ini yang tidak mempunyai dasar, menyebabkan merosotnya kedudukan Republik Indonesia ke dalam dunia Internasional sehingga Indonesia ter -

⁵⁰ Ibid, hlm. 47.

isolir dalam pergaulan dunia, dan sudah terlihat adanya gejala-gejala anti demokrasi yang berlangsung baik dalam tindakan-tindakan pemerintah ataupun dalam DPR di pusat dan di daerah-daerah. Satu catatan dalam kabinet ini telah membuka hubungan diplomatik dengan komunis yakni dengan menempatkan duta besar Rusia di Indonesia, suatu oportunist politik yang belum pernah dijalankan baik Kabinet M. Natsir atau kabinet yang masih dalam kontro Masyumi (1950-1953).⁵¹ Untuk menyelamatkan negara agar tidak terlalu semakin terus menuju ke arah krisis dalam segala lapangan, ekonomi, keuangan, atau dalam lapangan pemulihan keamanan dan politik luar negeri, maka sesuai dengan yang dikatakan M. Natsir dan sekaligus diberlakukan dalam partai Masyumi, yakni melakukan oposisi dengan cara yang lazim dalam demokrasi, M. Natsir merealisasikan itu dengan mengemukakan respon terhadap kebijaksanaan politik Kabinet Ali I yang banyak merugikan rakyat lewat berbagai pidato dalam parlemen, saat itu M. Natsir memang menjadi ketua fraksi Masyumi. Langkah-langkah M. Natsir kemudian diikuti oleh pemimpin Masyumi lainnya.

Dalam sebuah kritiknya yang sangat berani, M. Natsir membuka data kerugian negara yang selama itu di-

⁵¹ Deliar Noer, Op Cit., hlm. 306.

110

tutup-tutupi kabinet, dikatakannya bahwa pemerintah telah memberikan keterangan keadaan yang sebenarnya - tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dengan menyebut - kan angka-angka secara global M. Natsir menunjukkan , bahwa negara sebenarnya akan mengalami inflasi yang hebat.⁵² Demikian halnya berkenaan dengan hutang pemerintah yang semakin meningkat, tidak luput dari sorotan M. Natsir. Sehubungan dengan pernyataan Perdana menteri Mr. Wongsonegoro yang mengeluarkan "komando terakhir" yang berarti menyelesaikan keamanan negara semata-mata menekankan dengan kekerasan, sedangkan kebijaksanaan ini juga dilegitimasi presiden melalui pidatonya, yang mengatakan: "Apabila kata-kata saya tidak mempan, seluruh senjata berbicara suatu bahasa yang lebih hebat lagi".⁵³ M. Natsir sebagai pemimpin Masyumi merasa terpanggil untuk membela kebijaksanaan dan ketertiban bukan bergantung pada keluarnya "komando terakhir" untuk menghancurkan gerombolan senjata, melainkan pada isi komando itu. Ditambahkan bahwa penyelesaian itu juga bergantung pada keadaan aparat negara serta cara melaksanakan komando. Beliau juga mengingatkan atas pidato presiden bahwa pada waktu

⁵² Capita Selecta, II, hlm. 36-37.

⁵³ Deliar Noer, Op Cit, hlm. 335.

yang lalu telah banyak dilakukan perintah "terakhir", tetapi keadaan belum juga pulih.⁵⁴ Beliau tekankan lagi bahwa pemilihan keamanan tidak tergantung semata-mata pada kekerasan.⁵⁵ Dalam pidatonya di Parlemen, M. Natsir mengecam dan memberikan penyelesaian, bahwa "Soal keamanan tidak dapat diselesaikan secara militer sentris, namun yang perlu diperhatikan dalam keamanan ada dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, pertama, meneklukkan senjata dengan senjata. Kedua memulihkan kepercayaan dan hati rakyat."⁵⁶ Suatu hal yang sangat disesalkan M. Natsir dari pemerintah adalah tidak adanya usaha ke arah itu.⁵⁷ Bahkan sebaliknya pemerintah lebih bertindak jauh. Oposisi yang dilakukan Masyumi yang diprakarsai M. Natsir dilakukan secara demokrasi dengan berbagai kritik yang sifatnya "membangun", malah diterima pemerintah secara "negatif" dengan cara yang tidak demokratis, berlawanan dengan undang-undang dan Pancasila, bahkan alat-alat penerang-

⁵⁴Capita Selecta, II, hlm. 36-37.

⁵⁵Deliar Noer, Op Cit, hlm. 335.

⁵⁶Capita Selecta, II, hlm. 48.

⁵⁷Ibid, hlm. 36. Selain mengeluarkan kritik dalam parlemen itu M. Natsir juga mengemukakan pernya-
taan tentang keamanan dalam Suara Partai Masyumi No.8
Agustus 1953, Dalam Amanat, II, Op Cit, hlm. 48.

an yang diperoleh dari pajak rakyat, hanya dipergunakan bagi alat pemerintah dan partai-partai pemerintah sebagai aparat yang dalam pelaksanaannya tidak sanggup memberikan penerangan yang obyektif kepada masyarakat.⁵⁸

Pada umumnya para wartawan yang sepaham dengan pihak oposisi (Masyumi) sering dipanggil polisi dan jaksa⁵⁹ dan dipersulit pekerjaannya. Polisi diberi instruksi untuk melarang rapat-rapat umum yang membicarakan PKI Madiun. Sebaliknya partai-partai pemerintah tidak dilarang untuk memfitnah dan menuduh partai oposisi dan para pemimpin-pemimpinnya mengenai hal yang sama sekali tidak masuk akal.⁶⁰

Timbul suatu pertanyaan, bagaimana sikap dan pendirian pimpinan Masyumi dalam menghadapi desakendesakan yang amat kuat dan dari keadaan yang amat ka-

⁵⁸Yusuf Abdullah Puar, Op Cit, hlm. 205.

⁵⁹Dalam pengakuannya Natsir sudah dua kali dipanggil Jaksa. Dalam komentarnya "Al hamdulillah sejak Masyumi menjadi oposisi ini saya sendiri dipanggil Jaksa Agung, hal ini bagi saya sudah biasa. Lihat Amanat II, Op Cit, hlm.

⁶⁰Yusuf Abdullah Puar, Op Cit, hlm. 205.

178

cau. Ketua umum Masyumi M. Natsir menyerukan kepada segenap keluarga Masyumi untuk tetap berpegang teguh kepada khittah yang sudah ditetapkan dalam Mu'tamar Masyumi ke VI. Dalam seruannya terhadap keluarga Masyumi, M. Natsir menyatakan:

"Pada saat menghadapi tahun yang ke-9 dari kehidupan partai kita, kami ulangi seruan kami kepada seluruh keluarga Masyumi pada tanggal 6 Agustus 1953 yang lalu, yaitu:

- a. Perkuatlah dan atur organisasi lebih dari masa yang sudah-sudah.
- b. Suburkanlah ukhuwah dan silaturrahi di antara kita.
- c. Hendeklah selalu awas dan mengawasi supaya jangan sampai terpiket dan hanyut oleh perkataan dan tindakan provokasi.⁶¹

Dikatakan pula, bahwa menjadi bagian tugas dari Masyumi untuk melindungi umat Islam dari segala macam provokasi ini dari pihak-pihak yang lempar batu sem-bunyi tangan dan yang ingin melihat potensi umat Islam dibinasakan satu persatu dalam bentrokan dengan alat-alat kekuasaan negara. Beliau juga yakin akan kekuatan kalimat yang hak:

"Kita sampaikan, kita serukan Kalimat Hak itu di mana-mana kita berada dengan lisan dan tulisan dengan pelbagai cara dan saluran dengan segenap ketabahan dan semangat jihad yang sungguh-sungguh. Kita yakin akan adanya dlamir yang masih sehat dan subur dan menerima kebenaran, yang hidup dalam kalbu sebagian terbesar umat Islam dan bangsa Indonesia.⁶²

⁶¹ Amanat II, Op Cit, hlm. 53.

⁶² Ibid.

119

Demikian pula dalam seruan jihadnya yang dimuat pada Suara Partai Masyumi bulan Desember 1953, menekankan bahwa : "Perjuangan yang kita hadapi sekarang bukan dengan bedil akan tetapi perjuangan untuk menciptakan tercapainya cita-cita kita menegakkan suatu negara di bawah hukum Allah, akan kita pertahankan sesuai dengan khittah kita, legal parlementer."

Dalam suasana terancam akhirnya beliau menekankan kepada keluarga Masyumi, bahwa : "Disaat Masyumi diuji dengan kepungan dan ancaman beramairamai oleh lawan politik Masyumi, keluarga Masyumi mampu mengambil sikap "hasbunallah wani'mal wakil" - "cukuplah Allah melindungi kami."⁶⁴

Dengan dasar di atas menyumbangkan potensinya dalam masyarakat dan menyampaikan seruan suara pembawa kalimat hak, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam semua lapangan yang dapat dipergunakan.

Pada kesempatan Muktamar Masyumi ke VII di Surabaya, Natsir yang ketika itu dipercaya kembali untuk memimpin Masyumi, menyatakan kegembiraannya dengan melihat pertumbuhan Masyumi (cabang maupun anggota yang semakin berlipat ganda. Namun dengan adanya perkembangan ini menurut Natsir, hendaklah ja -

⁶⁴ Amanat, I, Op.Cit, hlm. 13.

//5

ngan sampai membawa pemimpin kepada rasa ujub (takabbur), akan tetapi harus bersyukur kepada kehadiran Allah.

Melihat kenyataan di atas menunjukkan bahwa Masyumi telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Oleh karena itu sebagai upaya agar Masyumi lebih bisa mengakar, Natsir berusaha :

- a. Menggiatkan dan merapikan susunan pendidikan kadernya.
- b. Menggiatkan perjuangan SBIInya, STIInya, Muslimatnya, pemuda dan pemudinya.
- c. Dan semua organisasi yang masuk kekeluargaan Masyumi.
- d. Membukakan jalan bagi usaha anggota istemewanya.
- e. Membawa umat muslim dengan tertib dan teratur kepada pemilihan umum yang pertama kali di tanah air, yang mudah-mudahan akan membukakan pintu bagi tingkat perjuangan yang lebih tinggi untuk mencapai cita-cita Masyumi.

Akhirnya pada kesempatan Muktamar ke VII di Surabaya dalam pidato penutupnya, Natsir menyampaikan berbagai persoalan politik yang dihadapi negara.

116

Dari pidato itu Natsir telah menguraikan berbagai cara dalam menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi negara. Hal yang demikian itu dilakukan Natsir sebagai ketua Masyumi, karena beliau (yang bertindak atas nama Masyumi) merasa berkewajiban untuk menunjukkan jalan keluar, untuk menunjukkan jalan dari kesukaran yang terdapat dalam segala lapangan tersebut.⁶⁶ Memang dalam putusan Mukdamadi Surabaya itu telah berhasil diuraikan Natsir berbagai alternatif yang harus ditempuh pemerintah dalam menghadapi kesuraman, baik mengenai politik dalam negeri terutama dalam menangani gerombolan bersenjata dan memberikan program di lapangan perekonomian, dan keuangan ataupun politik luar negeri dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

Jalan keluar untuk menghadapi kesukaran yang terdapat dalam segala lapangan dikatakan Natsir, "Kesukaran tidak dapat ditutupi dengan hanya mengemukakan angka statistik karena kesukaran itu terasa benar setiap harinya. Ketidakberhasilan pemerintah dalam melaksanakan programnya dapat dilihat pada kemerosotan dalam lapangan perekonomian serta kenangan kekalahan di PBB soal Irian Barat dan lain - lain .

⁶⁶ Amanat, I, Op.Cit, hlm. 19.

117

Sehubungan dengan sikap ujub,⁶⁷ seperti yang diterangkan atau disebutkan Natsir di atas, pada kesempatan di atas, Natsir juga mengingatkan pemerintah dengan adanya sikap melupakan bantuan luar negeri,⁶⁸ yang pada masa kemerdekaan ikut menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya sikap ini menyebabkan banyak negara-negara yang bersimpati (berdiri di belakang Indonesia), mundur satu persatu dan jauh berkurang dari sebelumnya. Untuk itu sebagai jalan penyelesaiannya menurut Natsir, perlumenghindarkan tindakan-tindakan keluar yang dapat merugikan bangsa Indonesia, dan sebaliknya berusaha mengembalikan rasa respek luar negeri terhadap bangsa Indonesia. Untuk masalah Irian Barat, Natsir menegaskan kepada pemerintah bahwa, Masyumi tidak gentar memperjuangkan claim nasional itu, namun Masyumi tidak menghendaki untuk menempuh jalan peperangan da -

⁶⁷ Sikap ujub (takabbur) yang dimaksudkan adalah perasaan adanya kekuatan untuk menghadapi soal secara sendirian saja, baik soal-soal dalam negeri maupun luar negeri dengan sedikitpun tidak mau mendengarkan apalagi menghargai orang-orang dari golongan lain.

⁶⁸ Pada kesempatan lain Roem juga membenarkan pernyataan Natsir, bahwa Indonesia telah banyak kehilangan simpati luar negeri yang sebelumnya telah membantu Indonesia. Untuk itu Natsir mengingatkan, perjuangan untuk kemerdekaan yang lalu keadaannya akan semakin berlarut-larut dan sukar sekali, kalau sekiranya tidak ada kurnia dari Tuhan berupa bantuan luar negeri.

178

lam memperjuangkan Irian Barat. Selanjutnya Natsir berpendapat, masih banyak jalan yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan Irian Barat, dan peperangan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya.

Sehubungan dengan pernyataan Natsir di atas, maka pada kongres Masyumi ke VII itu, Masyumi membuat statement bahwa, kabinet Ali I tidak mempunyaidasar lagi untuk berdiri terus. Hal ini tentunya didasarkan pada berbagai alasan. Oleh karenanya sebagai cara yang baik untuk memperbaiki keadaan adalah dengan membentuk kabinet yang baru untuk mencapai maksud-maksud baik di atas.

Untuk yang terakhir kalinya dalam rapat Masyumi di Surabaya di atas, Natsir mengingatkan akan bahayanya PKI. Beliau menghimbau hal tersebut dalam rapat akbar Masyumi yang dihadiri puluhan ribu kaum muslimin dan muslimat. Dikatakannya, agar umat Islam jangan terpedaya oleh janji-janji yang muluk yang sengaja disebarkan PKI, mereka tidak henti-hentinya menganjurkan mogok dengan tujuan agar rakyat, buruh, dan tani bertambah sengsara dan pemasukan kas bertambah kurang. Selanjutnya dikatakan pula bahwa umat Islam sudah mempunyai pedoman sendiri, yakni Al-Qur'an dan Hadist, bukan yang lain yang bertujuan untuk

menjerumuskan kehidupan kehidupan rakyat itu sendi -
ri.⁶⁹

Menginjak tahun 1955 yakni tahun menjelang diadakannya PEMILU yang pertama di Indonesia, seluruh kegiatan partai yang ada di Indonesia ditujukan untuk menghadapi PEMILU yang diadakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap tidak terkecuali pula Masyumi, yang juga bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU). Untuk dapat lebih mengetahui kebijaksanaan Natsir dalam mengendalikan partai Masyumi, maka kita ikuti perjalanan partai yang dibawa Natsir selama 1955.

Dalam ceramahnya pada tanggal 26 Maret 1955, yang bertempat di Balai Masyarakat di Denpasar, Mohammad Natsir berusaha meyakinkan pada masyarakat, bahwa Masyumi tidak bermaksud memiliki RI, akan tetapi berusaha memberi isi yakni dengan memasukkan nilai-nilai Islam dan melaksanakan demi kepentingan nusa dan bangsa. Mengingat kurangnya perhatian orang akan Islam, maka dengan maksud Masyumi itu diharapkan orang mengerti program Masyumi. Sebagai kata penutup Natsir mengharapkan PEMILU yang bakal dihadapi dapat berjalan dengan lancar agar parlemen yang a -

⁶⁹ Amanat, I, Op.Cit, hlm. 21

18
da di Indonesia benar-benar representatif.⁷⁰ Pesan - pesan tersebut disampaikan Natsir mengingat adanya berbagai pertentangan dan perlombaan idiologi yang pada saat itu disarankan oleh tiap-tiap partai.

Sehubungan dengan adanya kegaduhan, pertentangan antara pemerintah dan Angkatan Darat⁷¹ dan adanya kekacauan lain, yang menimbulkan gejala kewibawaan pemerintah yang semakin menurun, maka terdengar banyak suara yang menyatakan pembentukan kabinet presidetil, sebagai salah satu langkah menuju pada penyelesaian keadaan. Natsir sendiri sependapat dengan seruan ini.⁷²

Dikatakan Natsir Pula dalam menanggapi keadaan yang genting tersebut, bahwa Partai Masyumi tidak ada maksud dan tujuan untuk memanfaatkan keadaan untuk kepentingan partai Masyumi sendiri, bahkan selanjutnya Natsir juga menyerukan kepada partai-partai dan seluruh patriot Indonesia agar memperlihatkan jiwa yang besar dan kemampuan untuk membatasi diri dan mempertahankan demokrasi Indonesia.⁷³ Selan -

⁷⁰ Ibid., hlm. 24.

⁷¹ Kemacetan hubungan AD dan pemerintah lama-kelamaan akan menimbulkan kejatuhan kabinet.

⁷² Capita Selecta, II, Op.Cit., hlm. 305.

⁷³ Ibid.

jutnya dalam sebuah konperensi pers, (Harian Antara) pada tanggal 18 Juli 1955, Natsir menekankan kembali pernyataan di atas ditambahkan pula bahwa, untuk mengatasi persoalan tersebut hendaknya tiap-tiap partai harus mau mambatasi kepentingan masing-masing, dengan jalan menyerahkan pemerintahan kepada "Dwi Tunggal" Soekarno-Hatta.

Adapun menurut Natsir tentang pendirian Masyumi di lapangan politik dalam menghadapi PEMILU, dikatakannya: "PEMILU bagi Masyumi bukan merupakan perjuangan terakhir akan tetapi dapat juga dikatakan sebagai permulaan". Oleh karenanya jika Masyumi menghadapi kekalahan atau kemenangan orang tidak perlu merasa khawatir, Masyumi akan melepaskan perjuangannya dari dasar demokrasi dan parlementer.⁷⁴ Perjuangan itu dimaksudkan juga untuk menghadapi PKI.⁷⁵

Semenjak terdengar kabar, bahwa kabinet Ali telah menyerahkan mandatnya tanggal 20 Juli 1955, Natsir merasa lega, karena dengan demikian berarti menjaga agar jangan sampai terlampau lama negara dalam keadaan terkatung-katung, agak beruntung pula pada waktu itu pihak Angkatan Darat dapat mengendalikan

⁷⁴ Ibid, hlm. 306

⁷⁵ Ibid.

diri, dan Natsir merasa simpati atas sikap ini, karena dengan demikian berarti untuk waktu selanjutnya, situasi itu cukup memberi kesempatan bagi politisi untuk mencari penyelesaian atas dasar demokrasi.⁷⁶ Sehubungan dengan dibentuknya kabinet baru Natsir berpendapat, bahwa : Masyumi tetap menghendaki nasionalis zaken kabinet yang dipimpin oleh Dwi Tunggal adapun batas bekerja kabinet tersebut sampai Pemilu selesai, oleh karenanya menjadikan character kabinet dengan dua tugas pokok : penyelesaian masalah A.D dan penyelesaian Pemilu dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dilaksanakan dengan jujur dan tertib.⁷⁷

Tiba pada pembentukan kabinet baru yang dipercayakan kepada Burhanuddin Harahap tanggal 15 Agustus 1955. Mengenai orang-orang yang duduk dalam kabinet, secara tegas dikatakan Natsir, bahwa ; "pembentukan kabinet ini terdapat cukup banyak tenaga-tenaga yang segar, dan juga terdapat tenaga-tenaga yang sudah mempunyai pengalaman dalam pemerintahan", mereka diharapkan saling mengisi dengan te-

⁷⁶ Ibid., hlm. 308

⁷⁷ Ibid.

kad yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat. Dan Natsir cukup optimis untuk itu. Adapun tugas yang dijalankan kabinet Burhanuddin (Masyumi) ini dirumuskan dengan perincian dan program yakni memulihkan ketentraman jiwa dan memuaskan rasa keadilan rakyat, hanya dapat dicapai dengan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam semua tindakan.⁷⁸ Yang aneh kedengaran dari pernyataan Natsir adalah, kabinet harus berusaha memperpendek umurnya yaitu dengan melaksanakan Pemilu dan mempercepat waktunya dengan sebaik-baiknya. Kebijakan ini dilakukan, menurut Natsir semata-mata untuk membelakangkan kepentingan diri sendiri (Kepentingan Masyumi) untuk mencapai suatu kepentingan yang lebih tinggi. Kebijakan Zelfverlooching ini diharapkan M. Natsir akan menjadi pedoman bagi kabinet dan menteri-menterinya dalam menjalankan tugas yang besar tetapi mulia.

Setelah kabinet yang dipimpin Masyumi ini berjalan, telah membuktikan tugasnya untuk mengembalikan gezag (kewibawaan) pemerintah maka kabinet

⁷⁸ Kabinet juga diharapkan mendapat dukungancukup dari DPR yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani.

121

mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang dituduh melakukan tindakan korupsi pada masa kabinet Ali I dengan membawa mereka ke pengadilan. Di samping itu juga diambil tindakan pengembalian disiplin dan kesetiaan AD. Pengembalian pergantian pegawai masa kabinet Ali, Pemilu dapat dilaksanakan dan dalam kaitan hubungan dengan Belanda, kabinet ini berhasil mendapatkan posisi Indonesia pada tempat yang lebih menguntungkan daripada sebelumnya.⁷⁹

Pada tahun 1956 Masyumi berhadapan dengan kabinet yang lagi-lagi dipercayakan Presiden pada Ali untuk membentuk formatur, terbentuk tanggal 3 Maret 1956, dengan bentuk koalisi.⁸⁰ Agaknya Presiden pada tahun 1956 ini mulai mengusahkan konsepsi "demokrasi terpimpin" yang implementasinya disesuaikan dengan keadaan. Yang demikian itu adalah suatu hal yang tidak dapat dikompromi oleh Natsir (Masyumi) dari rencana yang berkaitan dengan gagasan tersebut adalah ikut sertanya PKI dalam kabinet, oleh karena adanya gejala-gejala adanya perbuatan kekuasaan oleh

⁷⁹ Deliar Noer, Op Cit. hlm. 246

⁸⁰ Dalam suatu kampanye Pemilu Presiden berulang-ulang mengatakan pendiriannya terhadap kabinet koalisi yang terdiri dari tiga golongan yaitu ; golongan Islam, golongan Nasionalis, PKI

diktator Komunis internasional itu pemimpin partai Masyumi (M. Natsir) menggariskan strategi dalam menghadapi pembentukan kabinet pada dua pokok yaitu, pertama dengan memulihkan kerja sama antar partai-partai Islam, kedua, menggabungkan tenaga-tenaga non komunis dalam kabinet, parlemen dan masyarakat serta mengisolir PKI atau para cripto komunis dari kabinet.

Untuk mencapai dua hal di atas, maka M. Natsir berpendapat, bahwa Masyumi harus bersedia memberikan korban dengan sebanyak-banyaknya sehingga batas yang tertentu.⁸¹ Realitas dari pernyataan ini dapat dibuktikan Masyumi mengorbankan kursi PPK (Pendidikan, pengajaran), Kenterian Dalam Negeri, Kenterian Agama. Sedangkan yang diperoleh Masyumi Wakil Perdana Menteri I, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Pekerjaan Umum. Walaupun terdapat ketidakpuasan dalam susunan formatur dalam kabinet Ali ini, namun menurut M. Natsir, Masyumi memutuskan untuk menerimanya dengan adanya suatu pertimbangan, demi :

⁸¹ Amanat, I, Op Cit, hlm. 70

- a. Memulihkan kerjasama antara partai - partai Islam dalam kabinet sehingga dapat berangsur-angsur menuju pada persatuan yang lebih erat untuk yang akan datang.
- b. Bersihnya kabinet dari pada tenaga PKI ataupun pengikut-pengikutnya.⁸²

Melihat adanya satu keinginan yang tidak tercapai (susunan daftar kabinet dengan tanpa memasukkan sekurang-kurangnya simpatisan PKI) presiden berusaha menahan daftar susunan itu dan berusaha menghadapi langsung dengan partai-partai agar mereka berkehendak pada keinginannya. Sikap Masyumi masih berpegang pada prinsip pimpinan partai. Sejak semula bagaimanapun juga tetap menolak duduknya PKI ataupun simpatisan PKI, dan usaha ini nampaknya tidak sia-sia, sehingga dapat dibentuk kabinet Ali II melalui pengesahan presiden tanggal 20 Maret 1956.

Ada satu koreksi yang dilakukan Masyumi terhadap kabinet Ali II, terutama dengan kebijaksana-

⁸²Padahal Kementerian P.P.K. di atas menurut Masyumi sangat penting artinya, baik ditinjau dari sudut perjuangan umat Islam umumnya, maupun bagi pembangunan rakyat Indonesia.

an Luar Negeri, yakni adanya pernyataan bersama antara Indonesia dan Rusia di Moskow. Walaupun Menteri Luar Negeri berkilah bahwa, pernyataan bersama itu tidak ditujukan pada Pakta Warsawa (Pakta militer antara Rusia dan negara Eropa Timur) sendiri dan masih menjalankan politik bebas dan aktif. M. Natsir sebagai ketua Masyumi tidak dapat menerima hal ini, dikatakannya, pada hakikatnya pernyataan itu telah menetralkan nilai-nilai propaganda Rusia (melalui joint statement) dalam dunia internasional. Hal ini menyimpang dari politik bebas dan aktif yang berarti bangsa Indonesia tidak mau ikut serta dengan Pakta militer, baik Barat maupun Timur.⁸³

Di tengah-tengah Masyumi menghadapi persoalan dalam negeri, tidak pula Masyumi (sesuai dengan keputusan Muktamar di Surabaya) mengabaikan perkembangan mengenai nasib umat Islam yang sedang tertindas, disamping juga memperjuangkan kemerdekaan mereka. Untuk itu Pimpinan Partai Masyumi M. Natsir memberikan kebijaksanaan untuk aktif membantu negara-negara Islam itu. Pernyataan ini memang agak nya

⁸³Amanat, I, Op Cit. hlm. 87

10

sudah direalisasikan, suatu contoh, M. Natsir sendiri telah mempelopori, dengan mengetuai sebagai panitia pembantu perjuangan Tunisia,⁸⁴ Sedangkan bagi perjuangan Aljazair pada waktu itu, menghadapi kekuatan Prancis yang amat besar. Dalam hal ini M. Natsir menyerukan kepada dunia Internasional untuk mengadakan konferensi dalam menyelesaikan masalah Aljazair. Dalam hal ini M. Natsir juga meminta perhatian pemerintah agar mengambil inisiatif, agar PBB turut menyelesaikan persoalan antara Perancis dan Aljazair, di PBB. Pada peristiwa lain yakni pada waktu pemimpin-pemimpin Aljazair ditangkap Perancis dengan tipu muslihat, maka M. Natsir sebagai pemimpin Masyumi, melakukan protes serta mengirimkan telegram pada Bey Tunisia, Sultan Maroko, serta sekretariat Mu'tamar Islam 'Am di Damascus.⁸⁵

Beranjak kembali pada persoalan dalam negeri pada waktu itu tercatat dua kejadian penting, pertama datang dari presiden yang memberikan keterangan tentang kekesalannya dan ketidakpuasannya terha-

⁸⁴ Dengan adanya bantuan moril yang diberikan Masyumi kepada raja Tunisia, beliau merasa berhak memberikan bintang penghormatan pada M. Natsir, baik atas nama Pribadi M. Natsir maupun partai Masyumi.

⁸⁵ Amanat, I. Op Cit. hlm. 77.

10

dap partai, yang menyebabkan terhalangnya pemba -
ngunan. Sebagai satu-satunya jalan untuk mengatasi
kesulitan dalam negara, katanya adalah dengan me-
nguburkan partai. Menanggapi pendirian presiden
ini, sebagai ketua Masyumi, M. Natsir menyatakan
ketidaksetujuannya, dengan alasan, apabila partai-
partai dikubur yang tinggal hanyalah diktator, dan
pemerintah diktator yang tidak didasarkan atas "Wa
amruhum syuro bainahum", Masyumi tidak dapat mene-
rima. Dikatakannya pula, bahwa yang menjadi sumber
kesukaran itu sebenarnya terletak pada, pertama, me-
luncurnya idealisme sehingga nafsu amarah muncul ke
atas, kedua, mengaburnya garis batas antara yang
patut dan yang tidak patut, antara yang halal dan
yang haram, ketiga, mengaburnya nilai-nilai yang
zakelijk dan obyektif untuk memutuskan persoalan -
persoalan dalam menempatkan tenaga-tenaga sehingga
yang putih dihitamkan, yang hitam dijadikan putih,
menurut keadaan dan keinginan penguasa sewaktu-wak-
tu sehingga Masyumi tidak dapat lagi menempatkan
"The right men in the right place", akan tetapi
"The wrong men in the most place". Dikatakannya pu-
la bahwa, sistem demokrasi di Indonesia mempunyai

antitoksin untuk memberantas penyakit dalam dirinya sendiri, yang berarti sanggup mengatasi kesulitan apabila partai-partai bersungguh-sungguh menempatkan petugas yang tepat pada tempat yang semestinya. Untuk itu menurut M. Natsir, partai Masyumi mempunyai tugas untuk memberikan sumbangan dalam pertumbuhan demokrasi yang sehat.⁸⁶ Persoalan kedua adalah berhentinya Wakil Presiden Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Wakil Presiden Moh. Hatta jauh sebelumnya sudah menyatakan kepada M. Natsir, dan setelah menganalisa akhirnya pimpinan Masyumi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan cara berfikir yang mendalam antara kedua pemimpin semenjak tahun 1950, sehingga tidak dapat dipertemukan dalam bentuk Dwi Tunggal, namun demikian pemimpin Masyumi ini mengharapkan Dwi Tunggal itu akan pulih kembali.⁸⁷ Usaha inipun masih dirintis partai Masyumi.

Dalam waktu yang bersamaan dengan kiprah politik M. Natsir dalam membawa partainya, M. Natsir berusaha memikirkan dan mengusahakan keselamatan

⁸⁶ Ibid, hlm. 81. Juga dalam Deliar Noer, Op Cit. hlm. 356.

⁸⁷ Ibid, hlm. 81-82

negara yang dipusatkan pada kabinet yang kelihatan bisa menstabilkan keadaan negara. Usaha yang dilakukan Masyumi untuk keluar dari kesulitan itu, M. Natsir telah memberikan nota terhadap pimpinan kabinet, sebagai langkah yang dapat diambil ke arah perbaikan keadaan, namun dalam kenyataannya ajakan ini kurang mendapat sambutan, yang sangat disayangkan ialah partai-partai yang duduk dalam pemerintahan tidak melihat bahaya yang mengancam negara, walaupun Masyumi berusaha untuk meyakinkannya, yang berarti Masyumi menantang arus secara sendirian. Di saat langkah-langkah yang ditempuh kabinet sudah tidak dapat meyakinkan partai Masyumi untuk menyelamatkan negara M. Natsir sebagai ketua Masyumi, telah memutuskan untuk keluar dari kabinet (9 Januari 1957) akan tetapi masih tetap menggalang kerja sama dalam kondisi yang berbeda.⁸⁸ Dari sikap penarikan diri ini kemudian disusul oleh partai-partai lainnya dan akhirnya kabinet Ali II meletakkan mandatnya pada tanggal 14 Maret 1957. Dalam suasana keruh itu presiden malah berusaha memanfaatkan keadaan

⁸⁸ Facta Documenta dalam Ibid. hlm. 103. dan lihat Deliar Noer, Op Cit. hlm. 255-256

120
untuk lebih muncul ke permukaan dengan memberlakukan keadaan bahaya yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Ali Sastrodjojo, dari sinilah presiden berhadapan dengan berbagai kritik yang dilontarkan M. Natsir sehubungan dengan tindakan presiden yang inkonstitusional.⁸⁹ Ketika diketahui presiden berusaha mendesak keinginannya untuk memasukkan PKI dalam kabinet darurat Ekstra Parlementer, langkah M. Natsir dalam Masyumi semakin menentang pemerintahan.

Semakin gencar presiden melaksanakan ide-idenya, semakin gencar pula M. Natsir memajukan kritiknya, melalui pers yang disebarkan kepada keluarga Masyumi dan masyarakat umum. Dalam suatu kritiknya dikatakan, bahwa komunis dan demokrasi adalah dua hal yang bertentangan seluruhnya, tujuan komunis justru untuk membunuh demokrasi. Dalam sistim

⁸⁹Yang menjadi pokok persoalan di atas adalah penyelesaian daerah-daerah dan penyelesaian AD. Sebenarnya hal itu muncul karena mereka menginginkan satu pemerintahan yang dipimpin Soekarno - Hatta. Sedangkan penandatanganan oleh Perdana Menteri dan berlakunya keadaan SOB dilakukan setengah jam setelah kabinet menyerahkan mandat yang berarti Perdana Menteri sudah demisioner. Tindakan (dikatakan melanggar UUD) ini yang sama sekali justru melanggar dari ketentuan keadaan SOB itu sendiri yang melanggar bagi siapapun untuk melanggar UUD.

komunis tidak akan pernah didapatkan kebebasan berfikir karena akal merdeka akan dibasmi oleh paham komunis yang totaliter dengan teknik mencuci otak yakni akan mengontrol akal manusia menurut kehendak mereka yang berkuasa. Padahal menurut M. Natsir, salah satu ajaran dari junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. yang penting adalah menghargai akal manusia dan melindunginya dari berbagai penindasan yang mungkin dilakukan orang atas nikmat Tuhan yang tiada ternilai itu.⁹⁰

Sehubungan dengan situasi genting dalam pemerintahan, M. Natsir menyerukan kepada keluarga Masyumi dan rakyat Indonesia. Seruan yang ditujukan kepada keluarga Masyumi, menggesa agar keluarga Masyumi hendaknya jangan meninggalkan kewajiban dan fungsi partai yang mengatur masyarakat berdasarkan musyawarah, walaupun sangat berat dikerjakan. Sedangkan seruan kepada umum, supaya bersama-sama, baik dari kalangan yang berpartai ataupun yang tidak berpartai, dalam menentang kediktatoran di Indonesia.

⁹⁰ Berkaitan dengan masalah itu, M. Natsir mengambil ayat Al Qur'an dalam surat Al Waqiah ayat 63, 64, 68-69, 71-72.

Bertepatan dengan tahun 1957, telah diadakan sidang konstituante. Sebagai wakil dari partai Masyumi, M. Natsir mencoba untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Dalam sidang tersebut M. Natsir membela dasar Islam dengan mengajukan Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna untuk dasar negara.⁹¹ Atas dasar yang diajukan ini M. Natsir kemudian berusaha meyakinkan terhadap kelompok non-Islam, bahwa dalam Islam cukup mengenal toleransi terhadap agama lain.⁹² Di samping itu beliau juga ber-

⁹¹ Lihat pidato M. Natsir yang dikutip dalam Harian Abadi dengan judul "Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna untuk dasar negara" (Amanat I, Op Cit. hlm. 120)

⁹² Dengan menyimak pendirian tokoh non Islam dalam menafsirkan Pancasila, M. Natsir menyambut baik Arnold Monotutu (Kristen) yang dikatakan M. Natsir bahwa adanya titik pertemuan antara umat Kristen dan umat Islam adalah sama-sama menghendaki dasar negara yang bersumber Wahyu Ilahi, (H. Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hlm 72.

⁹³ Terhadap pendukung Pancasila beliau menyekatakan bahwa sila-sila dalam Pancasila yang dimaksudkan oleh mereka ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai Pure Concepts yang steril tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai Falsafah Negara lebih lanjut beliau mengatakan "Saudara-saudara pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh state

usaha meyakinkan pendiriannya,⁹³ terhadap para pendukung Pancasila dan pendukung sosial ekonomi dasar negara.

Penulis tinggalkan perjuangan M. Natsir dalam mengajukan Islam sebagai dasar negara dan beralih perhatian pada kondisi partai yang dipimpin oleh M. Natsir. Pada masa mendekati akhir tahun 1957 partai Masyumi mengalami percoobaan yang begitu besar, hal ini adalah sebagai akibat dari usaha-usaha dan berbagai kebijaksanaan M. Natsir untuk terus menerus menghambat gerakan komunis (PKI) yang akan masuk dalam pemerintah. Dengan adanya dukungan yang diberikan presiden terhadap PKI maka PKI semakin mendapat keleluasaan bergerak. Karena Masyumi pada waktu itu masih tetap tidak akan menyerah untuk menyerukan "bahaya komunis", maka kelompok PKI ini berusaha menggunakan "senjata" untuk memukul Masyumi dengan memfitnah beberapa tokoh-tokoh Masyumi. Dalam harian PKI

Philosophy yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan, tak satupun dari lima sila dalam Pancasila akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara, dalam Islam terdapat kaedah-kaedah tertentu, "di mana pure concepts" dari sila-sila Pancasila mendapat substansi yang riil, mendapat jiwa dan roh penggerak untuk kelompok sosial, ekonomi dasar negara, M. Natsir mengatakan pada mereka bahwa, : Saudara-saudara pasti menemukan konsep sosial ekonomi yang progresip dalam Islam.

"Bintang Timur" memuat berita fitnahan , yang memuat bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 1957, diadakan pertemuan segi tiga antara M. Natsir, Mr. Moh. Roem dan wakil dari Amerika Serikat dengan partai oposisi (Masyumi). Yang menjadi pokok fitnahan itu adalah dihubungkannya nama M. Natsir dan Masyumi dengan kegiatan subversif A.S di Indonesia. Menanggapi berita fitnahan itu M. Natsir membantah dengan mengatakan "berita yang membawa-bawa nama kami dan Masyumi itu adalah fitnah besar yang dilontarkan oleh lawan-lawan politik Masyumi, untuk menimbulkan kecurigaan terhadap partai kami. Selanjutnya M. Natsir mengatakan, cara ini biasa dipakai oleh komunis; fitnah adalah salah satu senjata untuk memukul lawannya apabila sudah habis senjata yang lain. Dalam membela tuduhan ini, M. Natsir meminta kepada pemerintah untuk melakukan penyelidikan dan apabila telah terbukti hanya fitnah semata-mata maka pemerintah harus melakukan tindakan terhadap penyebaran fitnah itu.

94

Sementara M. Natsir dan partainya menghadapi teror fitnah yang terus merajalela dan intimidasi , M. Natsir tetap mengadakan koreksi terhadap pemerintah, yang ditujukan terhadap presiden yang terbukti benar-benar melanggar UUD, dengan dibentuknya kabi -

137

net Dewan Nasional yang diketuai oleh presiden sendiri, dan kabinet ini dilegitimasi dengan UU SOP. Dalam menanggapi dalil presiden yang tidak konstitusional, bahwa "Konstitusi dibuat untuk manusia dan bukan untuk konstitusi", maka M. Natsir mengatakan : "Pernyataan itu memberikan didikan yang tidak baik kepada rakyat untuk mentaati UU dan hukum yang berlaku di tanah air Indonesia". Sayang sekali kritik itu tidak diindahkan, bahkan atas koreksi terhadap presiden ini, ditandingi dengan PKI dengan fitnahan, hasutan tuduhan, terhadap Masyumi, pemimpin-pemimpin Masyumi beserta keluarganya. M. Natsir sudah mengusut Mr. Roem dan Sekjen Masyumi, M. Yunan Nasution untuk mengadukan ke Jaksa Agung dan juga pada Perdana Menteri Juanda, karena semakin hari semakin merajalela fitnahan itu.⁹⁵ Sampai pada puncaknya mereka mengadakan sabotase terhadap rumah M. Natsir, karena tidak memungkinkan untuk menjamin keselamatannya lagi, M. Natsir beserta keluarganya pergi ke Sumatera. Di daerah ini nantinya yang mencatat keterlibatan

⁹⁴ Kebetulan nama Sultan Sjahrir juga dibawa - bawa dalam harian "Bintang Timur", beliau membenarkan bahwa berita itu adalah bohong", karena berita itu berhubungan dengan pencemaran nama baiknya beliau menuntut harian "Bintang Timur" ke Pengadilan.

M. Natsir dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Kalau kita mau lihat secara jujur pemerintah tandingan PRRI (yang mana M. Natsir duduk sebagai anggota) adalah sebagai akibat langsung dari tindakan presiden yang sudah mulai bertindak jauh melanggar konstitusi, dan mulai terpengaruh oleh usaha tokoh-tokoh komunis agar PKI dapat duduk dalam lembaga eksekutif. Adapun peringatan cukup banyak diberikan oleh tokoh-tokoh Islam, seperti M. Natsir sendiri, namun peringatan itu tidak ditanggapi dengan semestinya bahkan sebaliknya kaki tangan Soekarno telah melakukan berbagai tekanan terhadap mereka yang tidak setuju dengan konsepsi presiden, sehingga dari sinilah akhirnya tokoh-tokoh Islam bergabung dalam PRRI.

Perlu juga dilihat, bahwa dengan hadirnya M. Natsir dalam PRRI justru telah mengurangi gejolak emosional para militer di daerah. Di samping memberikan sumbangan penting pada pemeliharaan teritorial Indonesia, karena M. Natsir berhasil menghalangi mereka (tokoh-tokoh militer). Yang lebih menyukai pemisahan Sumatera dari Indonesia dan menjadi negara tersendiri. Usaha tersebut diakui secara jujur oleh Prof. George Mc. Turnan Kahin yang telah

menulisnya dalam peringatan 70 tahun M. Natsir bahwa : untuk sebagian besar karena M. Natsirlah maka perjuangan PRRI itu telah dilakukan dalam batas-batas ikatan kesatuan Indonesia.⁹⁶

Atas dasar uraian di atas, yakni dengan bergabungnya M. Natsir dengan PRRI, maka hendaknya persoalan itu dapat dilihat pada proporsi yang sebenarnya.

C. Pokok Pemikiran M. Natsir Tentang Perjuangan Masyumi ✓

Berbicara mengenai pokok pemikiran M. Natsir dalam perjuangan partai Masyumi paling tidak kita harus melihat dulu cita-cita Masyumi dari semenjak berdiri (yang pada waktu M. Natsir menjadi anggota) sampai pada akhirnya ada perubahan yakni ketika M. Natsir menjadi ketua Masyumi.

Sejak dilahirkannya Masyumi, 7 November 1945 di Yogyakarta, yang dimaksudkan sebagai satu pemu - satan perjuangan kaum muslim, yang menjadi cita-cita dan tekad kaum muslim dalam perjuangan menghadapi pen-

⁹⁵Walaupun toh fitnahan dan ejekan itu dilontarkan pada Masyumi dan keluarganya, namun kata M. Natsir, Masyumi tetap senantiasa berlatih untuk mengendalikan diri.

jajahan telah dirumuskan dalam A.D Masyumi 1945, dengan kalimat : "Menegakkan RI dengan agama Islam ". Ditekankan hal yang demikian karena pada waktu itu Masyumi menurut M. Natsir, berjuang mengusir penjajah yang berarti menegakkan RI menghadapi musuh dari luar. Baik melalui jalan pertempuran, maupun diplomasi.⁹⁷ Selanjutnya perumusan ideologi di atas mengalami perubahan setelah penyerahan kedaulatan baik de facto maupun de jure. M. Natsir yang pada waktu itu telah dipercaya untuk memimpin partai Masyumi, merasakan sudah saatnya untuk mengisi kemerdekaan, sebagai partai politik sudah sewajarnya kalau Masyumi mengambil bagian dalam lapangan itu. Atas dasar pandangan seperti itu kemudian pada awal tahun 1952 A.D Masyumi dirubah, yang menggariskan tujuan dan perjuangan: "Melaksanakan ajaran Islam dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara RI". Sebagai kaum muslimin yang tersusun dalam partai Masyumi tentu mempunyai hak dan diberi kesempatan untuk mengisi negara dengan pandangan yang dapat membawa keselamatan pada rakyat dan bangsa tanpa diskriminasi. Untuk itu Masyumi sebagai partai

⁹⁷Yusuf Abdullah, Op Cit. hlm. 329

politik yang berkeyakinan hanya dengan ajaran Islam-lah bangsa dan negara Indonesia akan memperoleh kejayaan dan kerajaan dalam arti yang sebenarnya, maka perjuangan umat Islam dalam satu wadah partai politik (Masyumi) ditugaskan untuk menegakkan kalimatullah.

Untuk perjuangan di atas M. Natsir telah merumuskan pokok perjuangan tentang Masyumi dalam tiga persoalan.⁹⁸

Pertama, lapangan parlementer (legislatif); sebagai mana yang terdapat dalam tafsir azas Masyumi, perjuangan cita-citanya melalui jalan yang sah jalan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi yang menjadi sendi pokok adalah kemauan rakyat itu diwujudkan dengan Pemilu untuk membentuk parlemen di pusat dan sejumlah DPRD di daerah. Tentunya partai Masyumi yang mengesahkan dirinya sebagai partai politik mengerahkan seluruh kekuatannya ikut aktif untuk mendirikan wakil-wakilnya dan dewan-dewan perwakilan rakyat. Itu semua karena menurut M. Natsir: "Dalam dewan-dewan itulah Masyumi harus

⁹⁸ Ibid., hlm. 168-171

190

memperjuangkan segala perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Karena itu DPR merupakan hal yang esensial (benar-benar harus ada) dalam ajaran Islam. Islam sendiri yang sudah menjadi dasar Masyumi, lebih menghendaki agar segala urusan-urusan yang mengenai kepentingan kehidupan umat harus diputuskan dan diselesaikan terlebih dahulu dengan dasar musyawarah. Dengan demikian berarti, tiap paham dan usaha yang hendak mengatur dengan jalan kekerasan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun datang, Islam tolak. Selanjutnya dikatakan M. Natsir bahwa : "dasar musyawarah atau parlementerisme menurut ajaran Islam tidaklah berarti kalau ada satu golongan yang kebetulan mendapat kedudukan yang kuat dalam suatu badan perwakilan, tidak boleh bertindak semena-mena terhadap golongan yang kecil. Akan tetapi sebaliknya ajaran Islam memerintahkan untuk memperhatikan kepentingan golongan kecil, mengakui hak-hak mereka, terutama hak-hak pribadi, hak menganut agama, hak mengemukakan pendapat, hak kemerdekaan diri atau hak-hak azasi lainnya.

Kedua, perjuangan dalam lapangan pemerintahan (eksekutif)). Sebagaimana layaknya partai politik yang lain, Masyumi juga berjuang untuk mendapat ke-

142
dudukan dalam kabinet dan lain-lain aparat pemerin-
tan. Perjuangan wakil partai untuk menembus pemerin-
tahan menurut M. Natsir, bukan hanya mendapatkan ke-
dudukan an sich (semata-mata) akan tetapi yang lebih
penting untuk turut melaksanakan serta memikul tang-
gung jawab menjalankan eksekutif negara.

Wakil-wakil Masyumi yang duduk dalam pemerin-
tahan tentunya hendak melaksanakan cita-cita partai
dengan tidak meninggalkan pedoman untuk mengusahakan
kepentingan umum dan rakyat secara keseluruhan, tanpa
memandang tingkatan dan golongan. Semboyan yang di
gunakan bukanlah "Kami berjuang untuk kami tetapi ka-
mi berjuang untuk kita", yakni untuk keseluruhan rak-
yat Indonesia. Oleh karenanya sudah menjadi faham
partai bahwa merupakan suatu penyelewengan kalau ti-
dak hendak hendak dikatakan pengkhianatan terhadap su-
atu amanah, jika ada partai-partai yang memegang ke-
kuasaan partai politik dan pemerintahan hanya meng-
utamakan pengurus anggota-anggota dan golongannya sa-
ja.

Ketiga, lapangan pembinaan umat, lapangan per-
juangan menyusun tenaga umat dengan tertib, dengan
membangun perikehidupan lahir batin, mendidik sifat-
sifat pengertian, watak, akhlak dan lain-lain. Per-

19

juangan ketiga ini diterapkan dalam segala golongan pada masyarakat, golongan buruh, tani, dagang, dan seterusnya. Dari beberapa golongan ini kemudian di susun dalam suatu organisasi yang teratur, yang tidak hanya memikirkan dan mementingkan golongannya saja akan tetapi harus menginsyafi akan sangkut paut dan kepentingan antar golongan. Akan nampak suatu ketimpangan dalam masyarakat, seandainya golongan buruh dalam usaha memperbaiki kedudukannya tidak memperhatikan akibat-akibat yang timbul karena tindakannya dalam kehidupan kaum tani. Demikian juga kaum tani dalam usaha memperbaiki kedudukannya harus pula dijaga agar jangan sampai merugikan kaum buruh. Bagi kaum dagang juga berlaku hal yang sama, jika dalam usaha-usaha melancarkan pekerjaannya jangan sampai tidak memikirkan segala akibat-akibatnya bagi kehidupan kaum buruh dan tani. Pengertian dan koordinasi itu haruslah disusun sedemikian rupa hingga merupakan potensi yang masing-masing dapat menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Jadi kalau disederhanakan dari tiga pokok di atas bahwa lapangan perjuangan partai Masyumi yang dijelaskan oleh M. Natsir terdiri dari tiga perjuangan parlementer, perjuangan yang disebutkan untuk

menegakkan hukum (menyusun hukum) selanjutnya, kedua perjuangan untuk menyusun pemerintahan. Mengadakan kabinet untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan dasar partai (Islam) dan yang ketiga, pelaksana hukum, yakni seluruh warga negara atau seluruh rakyat yang sesuai dan dikehendaki hukum-hukum tersebut.

Tiga hal di atas mesti berkaitan satu dengan yang lain dan semua perjuangan itu dengan melewati jalan yang sah sebagaimana yang terbuka sebagian dalam negara RI yang berdasarkan kedaulatan rakyat melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi.

Dikatakannya perjuangan politik yang dijalankan - kan Masyumi berdasarkan Islam yang hendak menegakkan kalimatullah, melalui jihad fi sabilillah. Dikatakan jihad asghar, perjuangan mengusir penjajah dengan niat suci lill'laikalimatillah. Sedangkan perjuangan umat Islam atau Masyumi setelah merdeka membangun negara dengan lahir dan batin, dengan jihad membina masyarakat baik rohani maupun jasmani.⁹⁹

Demikianlah pokok pikiran yang dirumuskan M. Natsir untuk perjuangan Masyumi, pokok-pokok perumusannya di atas tentunya tidak terlepas sama sekali dari ketentuan azas partai.

⁹⁹ Amanat, II, Op Cit. hlm. 57